

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Jalan Pangeran Cinta Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Laman Kesbangpol.landakkab.go.id Pos-el kesbangpollandak@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Landak. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, dan RPD dan Renstra 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan dimasa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan Pemerintah Kabupaten Landak.

Ngabang, 24 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,


Samsul Bahri, S. Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721007 199802 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan	2
1.3. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II	 6
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	7
2.3. Sistematika Penulisan	7
 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 29
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Landak dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Landak tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Landak.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;

- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal;
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.7.2.4/1007/PEPP-BAPPEDA tanggal 10 Juli 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Landak, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang

-
-
- Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 780);
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 perihal Implementasi SIPD dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Tahun 2024 (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan



1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.1**.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah **tabel 3.1**

BAB IV P E N U T U P



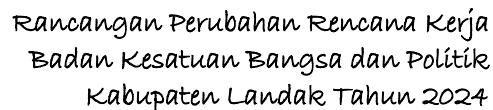
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

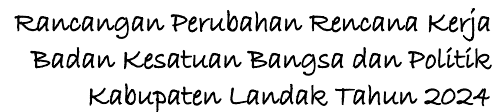
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 81,62% dan realisasi kinerja sebesar 47,46%.

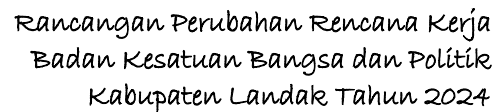
Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Jatuh Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 x 12	14 = 13% x 100%	15													
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp11.252.293.369,00	98%	Rp2.218.117.948,00	98%	Rp 2.420.712.430	0%	Rp -	98%	Rp 1.304.986.192	0,00%	Rp -	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD	13 Dokumen	Rp 188.664.000	4 Rp	26.303.780	3 Rp	15.446.400	0 Rp	-	3 Rp	15.391.451	0 Rp	-	Rp	-	3	Rp 15.391.451	7	Rp 41.695.231	53,85%	22,10%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 64.332.000	1 Rp	15.954.380	1 Rp	5.226.400	1 Rp	5.220.900				1 Rp	5.220.900	2	Rp 21.175.280	40,00%	32,92%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 62.166.000	2 Rp	4.426.900	1 Rp	5.079.600	1 Rp	5.068.000				1 Rp	5.068.000	3	Rp 9.494.900	75,00%	15,27%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 62.166.000	1 Rp	5.922.500	1 Rp	5.140.400	1 Rp	5.102.551				1 Rp	5.102.551	2	Rp 11.025.051	50,00%	17,73%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan	Rp 7.934.805.947	2 Rp	1.783.470.724	2 Rp	1.999.258.684	0 Rp	-	2 Rp	1.128.032.699	0 Rp	-	Rp	-	2	Rp 1.128.032.699	4	Rp 2.911.503.423	50,00%	36,69%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Rp 7.380.448.947	14	Rp 1.659.171.054	14	Rp 1.906.772.236	14	Rp 1.069.320.745				14	Rp 1.069.320.745	28	Rp 2.728.491.799	50,00%	36,92%							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp 480.000.000	1 Rp	118.772.160	1 Rp	86.931.648	1 Rp	53.186.354				1 Rp	53.186.354	2	Rp 171.958.514	50,00%	35,82%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Rp 65.356.000	1 Rp	5.527.510	1 Rp	5.554.800	1 Rp	5.525.600				1 Rp	5.525.600	2	Rp 11.053.110	50,00%	16,91%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi Kepegawaian	8 Laporan	Rp 322.687.600	-	Rp -	-	Rp -	14.769.300			Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	Rp 52.017.000	-	Rp -	-	1 Rp	14.769.300			Rp -	-	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0,00%	0,00%		
		Etimologi teknis Implementasi Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Etimologi Teknis Implementasi Peraturan Penunjang-undangan	8 Orang	Rp 270.670.600	-	Rp -	-	-	-			Rp -	-	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Kegiatan	Rp 1.639.993.629	5 Rp	287.323.150	6 Rp	252.177.846	0 Rp	-	4 Rp	117.358.868	0 Rp	-	Rp -	-	4	Rp 117.358.868	9	Rp 404.682.018	37,50%	24,68%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 139.373.520	1 Rp	43.073.037	1	24.002.000			1	Rp 11.625.155			1	Rp 11.625.155	2	Rp 54.898.192	50,00%	39,39%						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 121.231.000	2 Rp	35.052.500	1 Rp	22.162.200			1	Rp 7.053.300			1	Rp 7.053.300	3	Rp 42.105.800	75,00%	34,73%						
		Penyediaan barang cetakan dan pengendalian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	4 Paket	Rp 115.765.000	1 Rp	34.929.883	1 Rp	42.655.800			1	Rp 20.981.220			1	Rp 20.981.220	2	Rp 55.911.103	50,00%	48,30%						
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Penunjang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 38.4																						



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

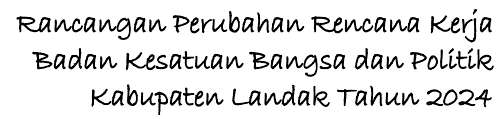


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	22.000.000	1	Rp	1.700.800	0	Rp	-	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	1.700.800	25,00%	7,73%			
	Penyusunan Bahan Penunjang Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	145.680.000	0	Rp	-	1	Rp	10.740.000		1	Rp	6.674.600			1	Rp	6.674.600	1	Rp	6.674.600	25,00%	4,58%					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1080	Orang	Rp	388.680.000	0	Rp	-	260	Rp	230.000.000		35	Rp	230.000.000			35	Rp	230.000.000	35	Rp	230.000.000	3,24%	59,17%					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	850	Orang	Rp	515.370.000	115	Rp	50.780.500									0	Rp	-	115	Rp	50.780.500	20,91%	9,86%						
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	Rp	21.700.000	0	Rp	-									0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	100 %		Rp	2.198.057.391	100	Rp	68.979.250	100%	Rp	93.050.077	0	Rp	-	0	Rp	36.050.200	0	Rp	-	0	Rp	36.050.200	100	Rp	105.029.450	100%	4,78%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %		Rp	2.198.057.391	119,47	Rp	68.979.250	100	Rp	93.050.077	0%	Rp	-	46,27	Rp	36.050.200	0,00	Rp	-	46,27	Rp	36.050.200	166	Rp	105.029.450	165,74%	4,78%		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	46.000.000	0	Rp	-	1	Rp	5.652.100						0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%			
	Penyusunan Bahan Penunjang Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	49.000.000	0	Rp	-	1	Rp	5.788.900						0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	330	Orang	Rp	300.530.000	92	Rp	14.435.000	80	Rp	9.084.600		2	Rp	2.940.000			2	Rp	2.940.000	94	Rp	17.375.000	28,48%	5,78%					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168	Orang	Rp	661.027.391	40	Rp	49.044.250	37		38.500.600		50	Rp	28.416.200			50	Rp	28.416.200	90	Rp	77.460.450	53,57%	11,72%					
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebutuhan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	Laporan	Rp	131.500.000	0	Rp	-	12	Rp	23.924.577		10	Rp	4.694.000			10	Rp	4.694.000	10	Rp	4.694.000	20,83%	3,57%					



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA



Tabel 2.2 Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Kesbangpol Landak

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	2.405.943.130	1.304.986.192	53,91%	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.446.400	15.391.451	99,64%	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.226.400	5.220.900	100%	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.079.600	5.068.000	100%	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.140.400	5.102.551	99%	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.258.684	1.128.032.699	56%	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.772.236	1.069.320.745	56%	100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.931.648	53.186.354	61%	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.554.800	5.525.600	99%	100%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	0%	0%	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.769.300	-	0%	0%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.177.846	117.358.868	47%	67%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.002.000	11.825.155	49%	100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.162.200	7.053.300	32%	100%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.655.800	20.981.220	49%	100%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.665.600	-	0%	0%	
Penyediaan Bahan/ Material	11.900.000	-	0%	0%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.792.246	77.499.193	54%	43%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.381.600	18.388.260	72%	100%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.381.600	18.388.260	72%	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.133.100	16.677.014	33%	100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.762.500	3.861.000	50%	100%	



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.370.600	12.816.014	30%	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.545.500	9.137.900	15%	38%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.311.200	7.283.900	13%	64%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.234.300	1.854.000	26%	20%	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	870.474.600	274.160.131	31%	0%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	870.474.600	274.160.131	31%	2%	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.943.300	5.711.750	48%	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	-	0%	0%	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	797.999.300	268.448.381	34%	488%	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10.532.000	-	0%	0%	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.759.095.402	27.118.497.402	85%	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31.759.095.402	27.118.497.402	85%	1%	



Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.112.100	-	0%	0%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	31.694.796.502	27.118.497.402	86%	100%	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.270.000	-	0%	0%	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.163.700	-	0%	0%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18.753.100	-	0%	0%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	112.129.546	-	0%	0%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	112.129.546	-	0%	0%	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.711.600		0%	0%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.820.400		0%	0%	



Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	98.452.000	0	0%	0%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.145.546	0	0%	0%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	240.740.000	236.674.600	98%	0%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	240.740.000	236.674.600	98%	14%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10.740.000	6.674.600	62%	100%	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	230.000.000	230.000.000	100%	13%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	93.050.077	36.050.200	39%	0%	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	93.050.077	36.050.200	39%	46%	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.652.100	-	0%	0%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.788.900	-	0%	0%	



Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.084.600	2.940.000	32%	3%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	38.500.600	28.416.200	74%	135%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23.924.577	4.694.000	20%	83%	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10.099.300	-	0%	0%	
Total	35.496.202.055	28.970.368.525	81,62%	47,67%	

Sumber : Data Bendahara s.d 10 Juli 2024

Penjelasan penyerapan Anggaran dan capaian target kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.226.400,- terealisasi sebesar Rp 5.220.900,- atau 99,89%. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (Dokumen Rencana Kerja tahun 2025).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.079.600,- terealisasi sebesar Rp 5.068.000,- Namun Dokumen RKA sudah disusun. Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

-
-
- SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen RKA Murni.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5,140,400,- terealisasi sebesar Rp 5.102.551,- atau 99,77%. Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 1 Laporan terealisasi 1 Laporan yaitu LAKIP tahun 2023.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu anggaran sebesar Rp 1.756.759.450,- pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.069.320.745,- atau 56,08%. Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 14 orang realisasi 17 orang yang terdiri dari 15 Orang PNS dan 2 orang PPPK.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang memiliki indikator jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan Pagu anggaran sebesar Rp 86.931.648,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 53.186.354,- atau 61,18%. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target kinerja 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang memiliki indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.554.800,- pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 5.525.600,- atau 99,47%. Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 Laporan realisasi 1 Laporan (dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023).
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu Rp 14.769.300,- belum ada realisasi anggaran dan realisasi fisiknya, kegiatan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp 24.002.000,- pada Triwulan II terealisasi Rp 11.825.155,- atau 49,27%. Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket realisasi 1 Paket.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp 22.162.200,- pada Triwulan II terealisasi Rp 7.053.300,- atau 31,83% dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya. Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket realisasi kinerja 1 paket.
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 42.655.800,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 20.981.220,- atau 49,19%. Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket realisasi 1 Paket.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.665.600,- sampai pada Triwulan II belum ada realisasi. Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja 1 paket belum ada realisasi. Rencananya kegiatan ini akan digeser ke perjalanan Dinas Biasa bidang sekretariat.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material dengan Pagu anggaran semula sebesar Rp 11.900.000,- sampai pada Triwulan II belum ada realisasi.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki indikator Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 143.792.246,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 77.499.193,- atau 53,90%. Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 77 Laporan realisasi 33 Laporan.
 - 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp 25.381.600,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 18.388.260,- atau 72,45%. Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target 7 unit realisasi 7 unit.

-
-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.762.500,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 3.861.000,- atau 49,74%. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 1 Laporan realisasi kinerja 1 laporan.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran sebesar Rp 43.370.600,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 12.816.014,- atau 29,55 %. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan realisasi 1 laporan.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 55.311.200,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 7.283.900,- atau 13,17 %. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 11 unit realisasi 11 unit.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.234.300,- pada Triwulan II terealisasi Rp 1.854.000,- atau 25,65% dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya. Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 15 Unit Realisasi 7 Unit.

3. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan:
- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 11.943.300,- pada Triwulan II terealisasi Rp 5.711.750,- atau 47,82%. Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

- Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun target 1 Dokumen realisasi 1 dokumen.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- pada Triwulan II belum terealisasi dan akan direalisasikan triwulan berikutnya. Dengan indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun target 1 dokumen dan belum terealisasi.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 797.999.300,- pada triwulan II realisasi sebesar Rp 268.448.381,- atau 33,64%. Kelompok belanja pada sub kegiatan ini adalah kegiatan Paskibra dari persiapan sampai pelaksanaannya. Pada triwulan I sudah dilaksanakan sosialisasi rekrutmen, rapat persiapan dan pelaksanaan seleksi. Selanjutnya pada triwulan III akan dilakukan diklat calon paskibraka terpilih serta pelaksanaan tugas paskibraka pada 17 agustus 2024 nanti. Adapun indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan target 74 orang realisasi 361 orang. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah peserta kegiatan Rapat Persiapan Seleksi Perekrutan Paskibraka, Kegiatan Seleksi Paskibraka, Sosialisasi Persiapan Perekrutan Paskibraka, Kegiatan Rapat Evaluasi Panitia Seleksi Paskibraka.
 - 4) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan Pagu anggaran sebesar Rp 10.532.000,- sampai pada Triwulan II belum terealisasi. Kegiatan ini akan direalisasikan pada triwulan III.

4. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 6.112.100 sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 31.694.796.502,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 27.118.497.402,- atau 85,56%. Anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (hibah KPU dan Bawaslu), Belanja Hibah kepada TNI POLRI dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun target 3 dokumen, realisasi 3 dokumen yaitu dokumen Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik (9 Parpol), hibah KPU dan BAWASLU, hibah TNI POLRI.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.270.000,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.

- 4) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 34.163.700,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 18.753.100,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.711.600,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.711.600,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 98.452.000,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.

- 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 6.145.546,- sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 10.740.000,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 6.674.600,-. Indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksaaan Fasilitasi Pengurus FKUB Kabupaten).
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 230.000.000,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 230.000.000,- atau 100%. Alokasi anggaran ini adalah untuk hibah Forum Kerukunan Umat Beragama. Indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah target 260 orang terealisasi 35 orang (terdiri dari Anggota Kepengurusan, Dewan Penasehat dan personalia Sekretariat).

7. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

-
-
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.652.100 sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun target 1 dokumen.
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.788.900 sampai pada triwulan II belum ada realisasi dan akan dilanjutkan triwulan berikutnya. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun target 1 Dokumen.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 9.084.600,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 2.940.000,- atau 32,36%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah target 80 orang realisasi 2 orang. Target kinerja terlalu tinggi karena pada saat perencanaan, anggarannya besar. Namun ketika dipenggaran KUA PPAS, harus bisa membagi anggaran yang sangat minim sehingga kemungkinan target tidak akan tercapai.

- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 38.500.600,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 28.416.200,00 atau 97,12%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 37 orang realisasi 50 orang (peserta rapat koordinasi penanganan konflik sosial).
- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp 23.924.577,- pada Triwulan II belum direalisasikan dan akan direalisasikan triwulan berikutnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, yaitu:

1. Beberapa sub kegiatan di Renstra 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tidak terakomodir didalam RKPD tahun 2024, karena harus menyesuaikan dengan Surat Edaran Bupati terkait Pagu Indikatif setiap OPD.
2. Program yang telah dilaksanakan pada Triwulan II sebanyak 6 program yang tercantum di Rencana Kerja 2024. Dari 39 sub kegiatan pada enam program di Triwulan II dengan total Anggaran sebesar Rp 35.496.202.055,- dan telah terserap sebesar Rp 28.970.368.525,00,- (81,62%). Adapun realisasi kinerja sebesar 47,46%.
3. Anggaran hibah lebih besar dibandingkan dengan anggaran operasional kantor. Total Belanja Hibah sebesar Rp. 32.020.719.402,-.
4. Realisasi Fisik Dan Anggaran bidang Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari dua program yaitu program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada triwulan I dan Triwulan II fokus pada

kegiatan seleksi Paskibraka dan hibah FKUB sehingga kegiatan lain pada program tersebut belum terlaksana.

5. Realisasi Fisik Dan Anggaran bidang Poldagri juga fokus pada penyaluran belanja hibah KPU dan Bawaslu, TNI POLRI dan Hibah bantuan keuangan parpol sebesar Rp. 31.694.796.502,- dengan realisasi 27.118.497.402 (85,56) yang memberikan nilai persentase realisasi anggaran menjadi tinggi.

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

A. Bidang Sekretariat

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, diusulkan **pengurangan anggaran** karena kelebihan dalam penganggaran dimana PTT yang dimaksud sudah lolos PPPK sehingga anggaran tidak dapat diserap lagi dan akan di alihkan ke Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, diusulkan **pengurangan anggaran** karena menyesuaikan dengan kebutuhan (tidak berlangganan surat kabar/majalah lagi) dan ada kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun. Sehingga sub kegiatan ini akan dihapus dan anggarannya akan dipindahkan menyesuaikan kebutuhan untuk Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Penyediaan Bahan/Material, diusulkan **pengurangan anggaran** untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu perlu pengadaan Komputer PC,Kursi Kerja Direktur,Meja Kerja 320,Lemari Besi 2 Pintu Besi.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diusulkan Penambahan anggaran untuk perjalanan dinas biasa karena kekurangan anggaran pada sub kegiatan dimaksud.

B. Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Sisa Honor PBJ dan SPPD paskibraka diusulkan untuk SPPD untuk Monitoring Desa Berkarakter Pancasila. SPPD paskibraka tidak bisa diserap sepenuhnya karena dianggarkan untuk mengantar calon paskibraka ke Jakarta apabila mereka lolos sampai tingkat pusat. Sedangkan untuk tahun ini mereka lolos sampai di tingkat provinsi saja. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya digeser untuk Pengukuhan FPK (Sewa Aula, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Pembawa Acara dan Rohaniawan, serta cetak spanduk) karena tidak bisa terserap.

2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara diusulkan penambahan anggaran untuk Monitoring. Monitoring tersebut harus dilaksanakan karena Sosialisasi Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila Tahun 2023 sudah dilaksanakan. Sebelumnya tidak diinput karena keterbatasan anggaran. Kemudian ada perubahan target kinerja yang awalnya 60 menjadi 50 karena menyesuaikan anggaran yang ada.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah diusulkan adanya Perubahan target kinerja yang awalnya 260 menjadi 35 karena dalam sub kegiatan ini merupakan anggaran untuk Hibah FKUB jadi target adalah jumlah keanggotaan kepengurusan, dewan penasehat, dan personalia sekretariat FKUB.

C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah diusulkan **penambahan anggaran** dan **pengurangan target kinerja**. Terjadinya pengurangan target kinerja 400 orang menjadi 150 orang karena menyesuaikan anggaran dan terjadi penambahan anggaran untuk perjalanan dinas kegiatan politik dalam negeri terkait kegiatan pilkada.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah diusulkan **pengurangan Anggaran** Perjalanan dinas. Hal ini dikarenakan salah memilih rincian belanja sebab anggaran perjalanan dinas sebagai penunjang mobilisasi kegiatan politik tidak dapat dilaksanakan tahun ini anggaran untuk sewa kendaraan diubah menjadi anggaran perjalanan dinas.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah di usulkan **pengurangan anggaran** yang akan diubah/digeser ke Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Perubahan ini dilakukan pada target kinerja dan anggaran. Target kinerja semula 100 orang diubah menjadi 9 orang karena menyesuaikan anggaran yang ada untuk mendukung kegiatan yang akan dipindahkan yaitu mendukung kegiatan sosialisasi politik melalui media cetak.
4. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah diusulkan **penambahan anggaran** untuk mendukung kegiatan sosialisasi pendidikan politik melalui media cetak.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.7.2.4/1007/PEPP-BAPPEDA tanggal 10 Juli 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Landak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Adapun perubahan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak lepas dari perwal tentang penjabaran APBD TA. 2024. Berikut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**.



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

Tabel.3. 1									
Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025									
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	Rp 6	7	8	5	10
	Urusan Wajib								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset			Rp 2.412.983.945				Rp 2.775.867.216
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD	Kab. Landak	3 Dokumen	Rp 15.446.400	APBD		3 Dokumen	15.446.400
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 5.226.400	APBD		1 Dokumen	5.226.400
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 5.079.600	APBD		1 Dokumen	5.079.600
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Landak	1 Laporan	Rp 5.140.400	APBD		1 Laporan	5.140.400
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Landak	2 Laporan	Rp 1.988.537.852	APBD		14 Laporan	1.981.765.616
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Landak	14 Orang/Bulan	Rp 1.906.772.236	APBD		14 Orang/Bulan	1.900.000.000
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 76.210.816	APBD		1 Dokumen	76.210.816
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Landak	1 Laporan	Rp 5.554.800	APBD		1 Laporan	5.554.800
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Lapangan yang dibelanjakan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 14.769.300	APBD		1 Paket	8.517.000
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 14.769.300	APBD		1 Paket	8.517.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Kegiatan	Rp 243.292.793			5 Kegiatan	460.138.200
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 24.002.000	APBD		1 Paket	24.048.000



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 22.162.200	APBD	1 Paket	30.060.000
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 42.655.800	APBD	1 Paket	Rp 35.030.200
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Landak	1 Paket	Rp 3.708.300	APBD	1 Paket	21.000.000
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Landak	77 Laporan	Rp 150.764.493	APBD	90 Laporan	350.000.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Landak	100 %	Rp 44.228.000	APBD	100 %	150.000.000
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Landak	7 Unit	Rp 44.228.000	APBD	8 Unit	150.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Landak	100 %	Rp 44.164.100	APBD	100 %	80.000.000
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Landak	1 Laporan	Rp 7.762.500	APBD	1 Laporan	10.000.000
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Landak	1 Laporan	Rp 36.401.600	APBD	1 Laporan	70.000.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Landak	100 %	Rp 62.545.500	APBD	100 %	80.000.000
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Landak	11 Unit	Rp 55.311.200	APBD	12 Unit	60.000.000
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Landak	15 Unit	Rp 7.234.300	APBD	16 Unit	20.000.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	Kab. Landak	11 Desa	Rp 870.474.250	APBD	12 Desa	622.980.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Landak	100 %	Rp 870.474.250	APBD	100 %	622.980.000
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Landak	3 Dokumen	Rp 11.943.300	APBD	3 Dokumen	123.420.000



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD	1 Dokumen	71.480.000
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Landak	60 Orang	Rp 792.364.000	APBD	66 Orang	364.000.000
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Landak	50 Keluarga	Rp 16.166.950	APBD	66 Keluarga	64.080.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku	Kab. Landak	100%	Rp 31.766.824.237	APBD	1	2.589.584.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Kab. Landak	9 %	Rp 31.766.824.237	APBD	100 %	2.589.584.000
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 6.112.100	APBD	1 Dokumen	20.000.000
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	5 Dokumen	Rp 31.698.366.502	APBD	1 Dokumen	2.246.984.000
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Landak	9 Orang	Rp 2.002.600	APBD	100 Orang	5.600.000

BAB. III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Landak	150 Orang	Rp	59.702.235	APBD		200 Orang	287.000.000
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kec. Di Kab. Landak	1 Laporan	Rp	640.800	APBD		1 Laporan	30.000.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif		97,20%	Rp	112.129.546	APBD		97,30%	94.600.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 %	Rp	112.129.546	APBD		100 %	94.600.000
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp	3.711.600	APBD		1 Dokumen	1.500.000
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp	3.820.400	APBD		1 Dokumen	2.000.000
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Landak	70 Orang	Rp	98.452.000	APBD		70 Orang	72.900.000
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Di Kab. Landak	1 Laporan	Rp	6.145.546	APBD		1 Laporan	18.200.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya		100%	Rp	240.740.000	APBD		100%	139.300.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 %	Rp	240.740.000	APBD		100 %	139.300.000

BAB. III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 10.740.000	APBD		1 Dokumen	39.000.000
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Landak	35 Orang	Rp 230.000.000	APBD		290 Orang	100.300.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah		100 %	Rp 93.050.077	APBD		100 %	773.030.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	Rp 93.050.077	APBD		100 %	773.030.000
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 5.652.100	APBD		1 Dokumen	12.000.000
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Landak	1 Dokumen	Rp 5.788.900	APBD		1 Dokumen	12.500.000
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Landak	80 Orang	Rp 9.084.600	APBD		80 Orang	73.030.000



Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak Tahun 2024

8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Landak	37 Orang	Rp 38.500.600	APBD		50 Orang	250.000.000
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Di Kab. Landak	12 Laporan	Rp 23.924.577	APBD		12 Laporan	25.500.000
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Landak	3 Dokumen	Rp 10.099.300	APBD		3 Dokumen	400.000.000
JUMLAH TOTAL					Rp 35.496.202.055				Rp 6.995.361.216



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juli 2024 (Cut Off data realisasi 10 Juli 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan Renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan anggaran ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ngabang, 24 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004